

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab menjelaskan beberapa teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Teori yang digunakan adalah teori perilaku pemilih, konsep pemilih pemula, dan konsep partai politik. Beberapa teori ini digunakan sebagai bahan dasar penguat argumentasi dan menganalisis lebih jauh mengenai pengaruh dominasi Partai Demokrasi Indonesia terhadap perilaku pemilih. Di dalam bab ini berisi tentang: (1) Tinjauan Pustaka, dan (2) Kajian Teori.

2.1 Tinjauan Pustaka

Didalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yang berasal dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang diambil tentunya memiliki korelasi terhadap pokok bahasan yang diangkat di penelitian ini. Selain itu penelitian mengenai perilaku pemilih sudah jadi barang lumrah untuk dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan beberapa judul penelitian, nama peneliti dan beberapa kesimpulan mengenai penelitian sebelumnya.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	TEMUAN DAN KESIMPULAN
1	Susilo Utomo, 2016	Fenomena Perilaku Memilih Pada Pilgub Jateng 2013	Munculnya pola perilaku memilih yang berorientasi pada Figur yang memiliki kedekatan emosional dengan pemilih partai pendukungnya, merupakan antiklimaks pola perilaku memilih yang pragmatis-transaksional. Pola perilaku memilih yang berorientasi pada Figur yang memiliki kedekatan emosional dengan partai merupakan pertanda partai politik dapat berperan sebagai institusi utama dalam demokrasi, bukan sekedar sebagai

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	TEMUAN DAN KESIMPULAN
			perahu sewa. Untuk itu, fenomena perilaku memilih pada Pilgub Jateng dapat digunakan sebagai rujukan atau model dalam pemilukada-pemilukada di daerah lain
2	RR. Emilia Yustiningrum, Wawan Ichwanuddin, 2015	Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih pada Pemilu 2014	Kajian mengenai perilaku pemilih menghadapi pemilu legislatif, yang berkaitan dengan faktor psikologis memperlihatkan beberapa catatan penting. Pertama, diskusi mengenai politik dalam lingkungan terkecil khususnya keluarga turut mempengaruhi pilihan dalam pemilu. Media massa khususnya televisi memberikan informasi terbanyak mengenai perkembangan politik terkini sehingga turut serta mempengaruhi pilihan dalam pemilu legislatif lalu. Kedua, rendahnya loyalitas terhadap partai politik serta tidak adanya identitas kepartaian pada seseorang, menjadikan mudahnya pemilih untuk pindah ke partai lainnya. Hal tersebut menyebabkan timbulnya jarak ideologis antara pemilih dengan partai politik. Sementara itu, kajian mengenai perilaku pemilih menghadapi pemilu legislatif, yang berkaitan dengan faktor rasional/ekonomi memperlihatkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan isu yang strategis bagi

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	TEMUAN DAN KESIMPULAN
			<p>mayoritas pemilih. Pemenuhan kebutuhan ekonomi ini yang kemudian berkembang menjadi kompetisi antar kandidat anggota legislatif, maupun antar partai politik sendiri, untuk membangun kedekatan dengan pemilihnya. Tujuan utamanya adalah bagaimana bisa mendapatkan dukungan dari pemilih yang kemudian mampu memberikan kesejahteraan kepada para pemilihnya.</p>
3	Haryanto, 2014	Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia	<p>Identifikasi partai telah menemukan jati dirinya dalam politik lokal di Sulawesi Selatan. Pemilih tidak lagi dominan melihat faktor kedekatan (<i>proximity</i>), baik kedekatan etnik maupun daerah dalam menentukan pilihan suara. Pemilih cenderung mengidentikkan diri dengan partai, yang kemudian menentukan pilihan suaranya kepada kandidat yang diusung oleh partainya. Evaluasi terhadap realita politik melalui asumsi kepuasan terhadap kepemimpinan <i>incumbent</i>, menjadi salah satu faktor lain yang memengaruhi perilaku memilih. Intinya adalah identifikasi partai dalam determinan afektif dan kognitif.</p>
4	Erna Febriani, 2018	Analisis Perilaku Memilih (<i>Voting</i>	<p>Secara parsial, faktor yang mempengaruhi perilaku memilih</p>

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	TEMUAN DAN KESIMPULAN
		<i>Behaviour</i>) Pemilih Pemula Wilayah Jakarta Barat Menjelang Pemilihan Umum 2019	pemilih pemula Jakarta Barat adalah pilihan rasional, sedangkan faktor sosiologis dan psikologis tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih pemilih pemula di wilayah Jakarta Barat. Peneliti berharap kesimpulan ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan atau pendidikan politik untuk pemilih pemula di wilayah Jakarta Barat dengan mengarahkan kepada bentuk-bentuk partisipasi politik aktif dan melibatkan diri dalam mengawasi proses politik menjelang pemilihan umum 2019. Pengaruh pilihan rasional pemilih pemula perlu ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi politik yang sehat dan cerdas untuk dapat mengarahkan pemilih pemula memberikan suara kepada calon yang cakap dan memberikan hasil terbaik bagi bangsa dan mendorong bangsa mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia internasional.
5	Danis T.S Wahidin, dkk, 2020	Partai Politik dan Perilaku Pemilih di Indonesia (Studi pada Pemilu Legislatif 2009, 2014 dan 2019)	Motif psikologi, sosiologi dan rasional dalam memilih partai politik terlihat mewarnai persepsi pemilih Indonesia pada pemilu 2019, meskipun motif rasional berupa penilaian bertahap program kerja tidak dominan dalam

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	TEMUAN DAN KESIMPULAN
			melihat partai politik, keadaan ini memperlihatkan perilaku pemilih Indonesia yang utuh. Sebuah partai politik yang ideal dalam persepsi masyarakat Indonesia haruslah ideologis, memiliki pemimpin yang karismatik dan memiliki program yang merakyat sekaligus.

Dari penelitian terdahulu, terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan penulis buat, kesamaan tersebut yaitu terdapat pada perilaku pemilih pemula. Terdapat juga perbedaan, khususnya subjek penelitian, waktu penelitian, tempat penelitian dan fokus penelitian. Fokus penelitian yang akan dikembangkan penulis adalah **“Pengaruh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Terhadap Perilaku Pemilih Generasi Z di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta”**

2.2 Kajian Teoritik

1. Partai Politik

Seperti yang dijelaskan pada latar belakang bahwa negara demokrasi memiliki indikator tertentu. Adanya partai politik merupakan salah satu indikator tersebut. Partai politik bukan hanya perkumpulan individu seperti organisasi yang berkembang dimasyarakat. Hal ini sudah dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1, dijelaskan tentang apa arti dari partai politik yaitu sekelompok warga negara yang mempunyai kepentingan bersama untuk membela kepentingan kehidupan warga negara.¹

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Partai Politik*

Partai politik sendiri awalnya berdiri pertama kali di negara-negara Eropa Barat. Di awal perkembangan partai politik ini berjalan negara barat seperti Inggris dan juga Prancis kegiatan politik terpusat pada kelompok politik parlemen. Partai politik didefinisikan sebagai suatu kelompok terorganisir yang para anggotanya mempunyai suatu orientasi, nilai dan cita-cita yang sama. Tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Sigmund Neumann berpendapat, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan dan juga ideologi sosial dan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. Salah satu fungsi dari partai politik yang tidak boleh dihilangkan adalah sebagai sarana sosialisasi politik. Perkembangannya bisa melalui media massa, diskusi publik dan juga sosialisasi khusus kader partai politik. Fungsi bagi partai politik itu sendiri yaitu, menciptakan citra bahwa partai tersebut sedang memperjuangkan kepentingan warga negara.

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional.²

Sudah banyak ahli yang menjelaskan definisi partai politik itu sendiri. Carl Friedrich menjelaskan, bahwa partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil yang mempunyai tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Kemudian, Roger Henry Soltau juga memberikan pandangannya tentang pengertian dari partai politik. Menurutnya, partai politik adalah perkumpulan dari sedikit banyaknya manusia yang terorganisir dan mereka bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan memanfaatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum yang mereka buat.

Partai politik memiliki fungsi yang berbeda ketimbang organisasi sosial dimasyarakat. Partai politik bisa dibidang kelompok politik, yang

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 403

memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum (baik bebas maupun tidak bebas).

Dari sekian banyak definisi yang dijabarkan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa partai politik erat hubungannya dengan; (1) Organisasi politik yang resmi, (2) Aktivitas politik, (3) Tujuan Politik. Keberadaan partai politik di Indonesia sebenarnya sudah sangat menggambarkan dari beberapa definisi para ahli. Partai politik di Indonesia tentunya memiliki tujuan, aktivitas politik, dan tentunya merupakan perkumpulan individu yang diakui oleh undang-undang.

Frank J Sorouf mencoba menjelaskan mengenai konsep sebuah partai politik dengan jelas dan gamblang, sebagai berikut:

- a. Mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum
- b. Organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat (ekstensif)
- c. Perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya
- d. Menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan, serta bekerja sebagai suatu kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggota anggotanya³

Selain pengertian yang disebut para ahli. Hafied Cangara mencoba mendefinisikan bahwa partai politik memiliki tiga prinsip dasar, yaitu:

- a. Partai sebagai koalisi, yakni membentuk koalisi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. Partai dibentuk atas dasar koalisi di dalamnya terdapat faksi-faksi.

³ Frank J Sorouf, *Partai Politics in America, second edition*, (Boston: Little, Brown and Company, 1972), hlm.20

- b. Partai sebagai organisasi, untuk menjadi sebuah institusi yang eksis, dinamis, dan berkelanjutan partai politik harus dikelola. Partai harus dibina dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus representasi dari sejumlah orang atau kelompok. Tugasnya adalah mencalonkan anggota untuk pemilu dengan label partai, mengambil bagian dalam pemilu, mengajukan calon yang disepakati, mengumpulkan dana, dan membuat isu propaganda dalam kampanye. Untuk itu, partai politik melakukan mobilisasi kepada anggota- anggotanya untuk loyal kepada partai.
- c. Partai sebagai pembuat kebijakan. Partai politik juga berbeda dengan kelompok sosial lainnya dalam hal pengambilan kebijakan. Partai politik mendukung secara konkret para calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Dari posisi ini mereka memiliki kekuasaan untuk memengaruhi atau mengangkat petugas atau karyawan dalam lingkup kekuasaannya, bahkan turut memberi pengaruh dalam pengambilan kebijakan di kementerian dimana kader partai menduduki posisi yang sama melalui kolegitas partai.⁴

Dari definisi yang disebutkan oleh beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang resmi dan diakui undang-undang yang dibentuk oleh orang- orang yang mempunyai kepentingan sama, dengan tujuan menguasai pemerintahan, melalui penempatan kader politiknya di pemerintahan melalui pemilihan umum.

Modernisasi tak hanya menyangkut perkembangan teknologi saja melainkan adanya modernisasi, membuat partai politik mengalami perubahan yang sangat besar. Partai politik sendiri memiliki dimensi fungsi yang perlu diperhatikan. Menurut Firmanzah Peran dan fungsi partai politik dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Dalam fungsi internal, partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan,

⁴ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.209

pembekalan, dan pengaderan bagi anggota partai politik demi langgengnya ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik tersebut. Sedangkan dalam fungsi eksternal peranan partai politik terkait dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini karena partai politik juga mempunyai tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi, dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.⁵ Sejalan juga dengan pernyataan Miriam Budiardjo, bahwa terdapat empat fungsi partai politik sebagai berikut;⁶

a. Sarana komunikasi politik

Kedudukan partai politik yang berada di antara masyarakat dan pemerintah membuat partai politik menjadi suatu komponen penting dalam sistem politik. Almond dan Powel menyebutkan bahwa artikulasi dan agregasi kepentingan sebagai salah satu fungsi tanpa menyebutkan komunikasi politik. Namun, pada hakikatnya artikulasi dan agregasi kepentingan tersebut merupakan suatu bentuk dari komunikasi politik itu sendiri.

b. Sarana sosialisasi politik

Secara harfiah, sosialisasi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Sedangkan sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui sosialisasi politik ini partai politik berusaha untuk menanamkan ideologi partai kepada masyarakat. Proses sosialisasi tersebut dilaksanakan baik secara sengaja dengan cara formal ataupun nonformal, maupun dengan cara tidak disengaja yaitu melalui hubungan bermasyarakat sehari-hari.

c. Rekrutmen politik

⁵ Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2008), hlm. 87

⁶ Miriam Budiardjo, *op. cit.* hlm. 420

Menurut Gabriel Almond, proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan latihan. Sedangkan Jack C. Plano mengartikan bahwa proses rekrutmen sebagai pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Sedangkan rekrutmen politik menunjuk pada pengisian pada posisi formal dan legal, serta peranan-peranan yang tidak formal. Untuk posisi formal seperti pengisian jabatan presiden dan anggota parlemen, sedangkan yang tidak formal adalah perekrutan aktivis dan propaganda.

d. Pengatur konflik

Pada sistem politik di negara yang demokratis, pengendalian konflik tersebut merupakan fungsi dari partai politik. Konflik jangan dianggap sebagai penghalang dalam mencapai suatu tujuan akan tetapi hendaknya konflik dipahami sebagai jalan untuk mencapai kebaikan bersama. Kebaikan bersama akan tercapai apabila partai politik mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul melalui cara-cara yang dialogis. Cara-cara dialogis yang dimaksud ialah dengan menerima dan mengumpulkan berbagai aspirasi dan kepentingan pelaku konflik lalu membahasnya dalam musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil dari musyawarah tersebut ialah solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik secara *win-win solution*. Agar didapatkan solusi yang terbaik, para wakil rakyat dari masing-masing partai harus mau berkompromi dan meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai.

2. Figur Politik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia figur diartikan sebagai; Pertama, bentuk; wujud. Kedua, tokoh. Dari arti ini, kita bisa memahami

bahwa figur adalah individu-individu yang sudah menjadi tokoh dan punya peran sentral di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁷ Berbicara tentang pengertian figur, kita tidak bisa melepaskan dari pengertian seorang pemimpin. Meskipun sebenarnya figur derajatnya jauh lebih tinggi dari pemimpin. Legitimasi seorang figur dalam waktu tertentu sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Figur memiliki akses yang mudah untuk berembrio menjadi seorang pemimpin, tetapi pemimpin butuh waktu lama untuk menjadi seorang figur.

Dalam kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary kata figur memiliki banyak arti, di antaranya sebagai berikut: "*representation of a person or an animal in drawing, painting, etc* "human form, esp appearance, what it suggest, and it seen by others".⁸ Dari penjelasan ini bisa dipahami bahwa figur adalah individu yang bisa menjadi representasi dilihat dari penampilannya dan bagaimana orang menilainya. Figur adalah individu yang mempunyai kelebihan, sehingga layak untuk menjadi representasi banyak orang. Figur merupakan sosok yang memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan, termasuk strategi dan peraturan internal.

Pengaruh figur sangat terasa dalam kehidupan bermasyarakat, dan tentunya sangat berpengaruh dalam tindakan suatu kelompok masyarakat. Figur juga bisa diartikan sebagai pemimpin. Keberadaan pemimpin bukan hanya pada kelompok kelas sosial bawah melainkan juga kelas sosial atas. Pemimpin ditunjuk berdasarkan keinginan masyarakat yang dominan. Hal ini sesuai dengan pernyataan M Alfian bahwa figur mampu mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat untuk melakukan apa yang dia inginkan. Figur itu pemimpin. Pemimpin itu adalah manusia pilihan.⁹ Dalam organisasi baik yang skalanya masih kecil sampai yang sudah maju sekalipun, pasti

⁷ "Pengertian Figur" diakses pada 1 Juni 2022 dari <http://kbbi.web.id/figur>

⁸ A.P Cowie, ed., *Oxford Advanced Learner Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 1989), hlm. 452

⁹ Alfian Alfian, *Kekuatan Pemimpin*, (Jakarta: Kubah Ilmu, 2012), hlm. 75

tidak bisa dilepaskan dari seorang pemimpin: pemimpin ialah puncak yang terpilih, ia diberi amanah dan kepercayaannya untuk melaksanakan tanggung jawab yang melebihi orang-orang yang masih dibawahnya secara struktural. Kekuatan seorang pemimpin terletak pada keistimewaannya. Amanah dan tanggung jawab inilah yang membuat seorang pemimpin istimewa.

Esensi dari figur itu sendiri punya kesamaan dengan esensi dari istilah tokoh, pemimpin, atau elit. Hamdi Muluk dalam bukunya *Mozaik Psikologi Politik Indonesia* (2010) menjelaskan bahwa seorang pemimpin pada dasarnya tidak harus memiliki kemampuan yang luar biasa, pemimpin hanya di tuntut memiliki kualitas akhlak dan keteladanan yang luar biasa, pemimpin harus amanah, segala tingkah lakunya harus bisa menjadi teladan bagi para pengikutnya.¹⁰

Menurut Dan Nimmo dalam *Kajian Kepemimpinan Politik*, ia berpendapat bahwa seorang individu bisa dianggap menjadi pemimpin jika memiliki karakteristik tertentu. Individu harus memiliki pengaruh terhadap sesuatu individu lain dalam menjalankan fungsi kelompok. Selain itu karakteristik pemimpin juga dapat dilihat dari cara perilaku pemimpin dalam menjalankan tugasnya untuk mengarahkan tiap individu dalam suatu kelompok.¹¹

3. Persepsi Masyarakat

Persepsi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹² Sementara dalam Kamus Psikologi, persepsi mengacu pada kajian proses sentral yang memberikan koherensi dan kesatuan input sensoris (proses periperal)

¹⁰ Hamdi Muluk, *Mozaik Psikologi Politik Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2010), hlm.70

¹¹ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik*, (Bandung: Rosdakarya, 2005), hlm.38

¹² "Pengertian Presepsi" diakses pada 1 Juni 2022 dari <http://kbbi.web.id/presepsi>

meliputi proses-proses komponen perilaku secara fisikal, fisiologis, neurologis, sensori, kognitif dan afektif.¹³

Ensiklopedia Indonesia menyebutkan bahwa persepsi adalah “Proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu sehingga dapat mengenal sesuatu objek dengan jalan asosiasi pada sesuatu ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, indera perabaan dan sebagainya sehingga bayangan itu dapat disadari”.

Selanjutnya istilah masyarakat memiliki makna umum, sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu "society" yang berarti "masyarakat", lalu kata society berasal dari bahasa Latin yaitu "societas" yang berarti "kawan".¹⁴

Sedangkan persepsi masyarakat mempunyai banyak pengertiannya, diantaranya adalah, persepsi masyarakat merupakan proses antara individu-individu dalam menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada tindakan mereka.¹⁵ Persepsi masyarakat adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul dan berinteraksi.¹⁶

Menurut Walgito, ada beberapa tahapan untuk mempengaruhi persepsi. Pertama, penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu. Rangsang atau objek dalam hal ini diserap atau diterima oleh berbagai panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium,

¹³ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta : Aksara baru, 1986), hlm. 31

¹⁴Prasetyo, “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya”, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 No.1 (Mei, 2020), hlm. 163-175

¹⁵Mariana, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 2

¹⁶Yuditrinurcahyo, “Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Rencana Umum Tata Ruang Kota Kendal”, (Tesis tidak diterbitkan, Jurusan Teknik Pembangunan Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 28

dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.¹⁷ Hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak. Gambaran tersebut dapat tunggal atau jamak, tergantung objek persepsi yang diamati. Di dalam otak terkumpul gambaran-gambaran atau kesan-kesan, baik yang lama maupun yang baru saja terbentuk. Jelas atau tidaknya gambaran tersebut tergantung dari jelas atau tidaknya rangsangan, normalitas alat indera dan waktu yang baru saja atau sudah lama.

Kedua, pengertian atau pemahaman adalah proses yang telah menjadi gambaran gambaran atau kesan-kesan di dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolong-golongkan (diklasifikasi), dibandingkan, diinterpretasikan, sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Pengertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran-gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya (disebut apersepsi).

Ketiga, penilaian atau evaluasi. Apabila sudah mengerti dan memahami, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat individual.

4. Perilaku Pemilih

Menurut Surbakti, perilaku memilih/pemilih mempunyai pengertian keikutsertaan dalam pemilihan umum, serangkaian membuat keputusan, dan serangkaian membuat keputusan merupakan bagian perilaku memilih. Artinya, mengindikasikan adanya upaya mengaktualisasikan keputusan bersama, baik dalam kaitannya dengan pemerintahan dan juga dengan masyarakat selaku aktor dalam

¹⁷ Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 1989), hlm. 54-55

mempengaruhi pemerintahan yang mempunyai fungsi mengaktualisasikan kebijakan, sehingga dalam sistem demokrasi, masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pengikutsertaan terhadap pemilihan umum dapat dikategorikan sebagai perilaku memilih/ pemilih.¹⁸

Selain itu, dalam perilaku memilih, membedakan jenis pemilih, yakni: pertama, pemilih rasional. Jenis pemilih rasional memiliki orientasi tinggi pada *policy problem solving*, dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Selain itu, pemilih lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program kerjanya. Program kerja tersebut dapat dilihat dalam dua hal, yakni kinerja di masa lampau dan tawaran program untuk menyelesaikan permasalahan nasional yang ada. Di sisi lain, pemilih rasional memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan faktor ideologi suatu partai politik atau kandidat tertentu. Hal yang terpenting dalam menentukan pilihannya, pemilih rasional melihat apa yang bisa dilakukan oleh partai atau kandidat, daripada paham atau nilai partai dan kandidat tertentu.

Kedua, pemilih kritis. Pemilih kritis merupakan jenis pemilih yang memadukan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa dan tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Proses untuk menjadi jenis pemilih ini, bisa terjadi melalui dua mekanisme: 1) jenis pemilih yang menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik atau kandidat mana yang mereka pilih; 2) pemilih akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan dan bisa juga terjadi sebaliknya. Pemilih akan tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan yang kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan.

¹⁸ Ramlan Surbakti, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 170

Ketiga, pemilih tradisional. Pemilih tradisional memiliki orientasi ideologi yang tinggi dan tidak terlalu melihat hasil kebijakan yang telah dibuat oleh partai atau kandidat dalam menentukan pilihan politiknya. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai asal-usul, paham, dan agama dalam menentukan pilihan politiknya. Selain itu, pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kandidat.

Keempat, pemilih skeptis. Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kandidat tertentu. Di sisi lain, mereka juga kurang mempedulikan program kerja atau “platform” dan kebijakan partai politik.¹⁹

5. Generasi Z

KBBI menjelaskan bahwa generasi adalah sekalian orang yang kira-kira sama waktu hidupnya.²⁰ Karl Mannheim mendefinisikan generasi adalah suatu konstruksi sosial dimana didalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis yang sama. Individu yang menjadi bagian dari satu generasi, adalah mereka yang memiliki kesamaan tahun lahir dalam rentang waktu 20 tahun dan berada dalam dimensi sosial dan dimensi sejarah yang sama.²¹

Pada penelitian yang dilakukan, subjek penelitian adalah pemilih generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang akrab dengan teknologi. Perbedaan yang signifikan antara generasi ini dengan generasi sebelumnya adalah penguasaan teknologi dan informasi tiap individunya. Hal ini terjadi karena akses internet sangat mudah didapat dibanding generasi sebelumnya, yang tidak leluasa mengakses karena tidak adanya fasilitas yang menunjang. Tentunya dengan keleluasaan akses informasi inilah yang

¹⁹ Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2008). hlm. 87

²⁰ “Pengertian Generasi” diakses pada 6 Desember 2022 dari <https://kbbi.web.id/generasi>

²¹ Karl Mannheim, “The Problem of Generations”, *Essays on the Sociology of Knowledge* (Routledge, 1952 republished 1972), hlm.272

membuat Generasi Z memiliki cara pandang dan penilaian yang berbeda dibanding generasi sebelumnya.

Tabel 2. Perbedaan Generasi

No	Nama Generasi	Tahun Kelahiran
1	Generasi Veteran	1925-1946
2	Generasi Babyboom	1946-1960
3	Generasi X	1960-1980
4	Generasi Y	1980-1995
5	Generasi Z	1995-2010
6	Generasi Alfa	2010+

Menurut Surya Putra, bahwa terdapat perbedaan yang mendasar, sehingga sebuah generasi dapat dikelompokkan. Dapat dilihat bahwa terdapat pengelompokan generasi pada tabel 3.²² Orang awam sering salah mengartikan bahwa Generasi Milenial dan Generasi Z sama. Memang secara penggunaan teknologi Generasi Milenial atau Y juga menggunakan teknologi sebagai alat bantu untuk kehidupan sehari-hari. Namun Generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda yaitu akses teknologi sudah didapatkan sejak kecil, berbeda dengan Generasi Y yang baru bisa merasakan teknologi sejak adanya internet tahun 2000. Selain itu Generasi Z sangat mengikuti perkembangan teknologi.

²² Surya Putra, "Theoretical Riview: Teori Perbedaan Generasi", *Jurnal Among Makarti*, Vol.9 No. 18 (Desember, 2016), hlm.130